

Laporan Teknis

**PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN DAN TERINTEGRASI
DI PEGUNUNGAN SIMPANG, JAWA BARAT**

Pelaksana:

Yayasan Pribumi Alam Lestari (YPAL)
Indigenous Nature Conservation Society
Jl. Paledang No. 21 Cibeurem
Bandung 40184, Jawa Barat
Fax./tel.: +62 22 6070139
E-mail: ypal@bdg.centrin.net.id; ypal@ypal.or.id
Website: <http://www.ypal.or.id>

Didukung oleh:

CRP/ACE
NC-IUCN

Bandung, 2004

Ringkasan

Desentralisasi pengelolaan hutan terbukti efektif dilakukan di tingkat desa dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang terintegrasi di CA Gn Simpang. Kondisi tersebut dicapai dengan membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat melalui penguatan fungsi kelembagaan desa untuk mewadahi kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Desa didorong untuk membentuk kerangka kerja tata kelola hutan yang dituangkan dalam peraturan desa termasuk implementasinya. Menguatnya kemandirian masyarakat menjadi tekanan politis yang efektif menuju good forestry governance. Sebagai gambaran dari pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan adalah masyarakat mampu menghentikan beroperasinya 61 chainsaw dalam illegal logging, menghentikan perambahan hutan, perlindungan mata air dan mengurangi perburuan satwa. Hutan alam di sekitar desa dapat dikatakan aman dan kondisi serta fungsi ekologis hutan mulai pulih kembali.

Untuk memperkuat desentralisasi pengelolaan hutan, dilakukan upaya membangun kebijakan lokal dalam penataan sumberdaya dan aplikasi pemetaan partisipatif menjadi ujung tombak. Hasil pemetaan partisipatif memberi dampak yang luas, diantaranya adalah upaya penyelamatan lahan komunal, mereduksi konflik lahan di internal desa, dan membangun sinergi antar desa tetangga dalam pengelolaan tata ruang dan pertukaran pengetahuan.

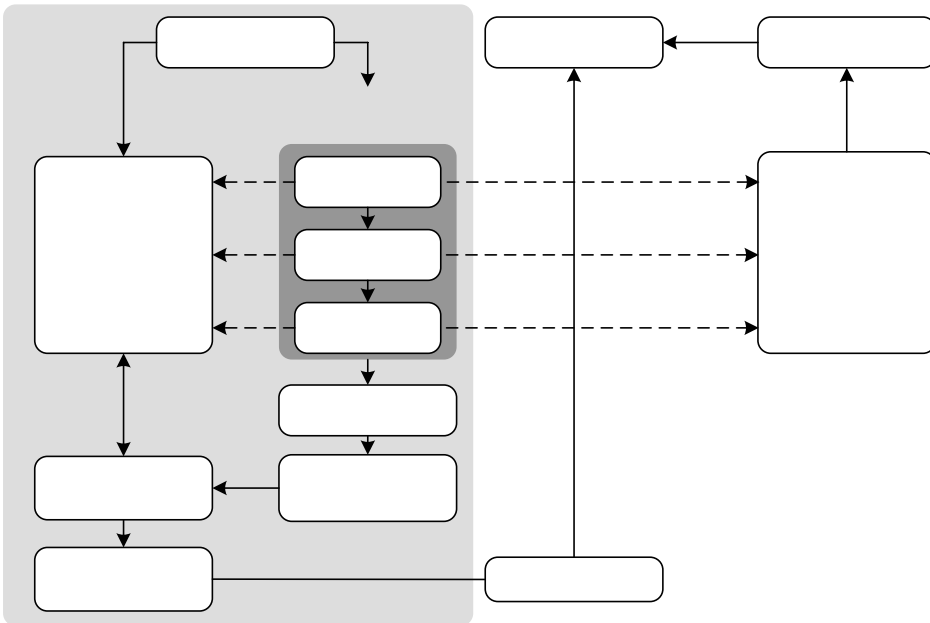
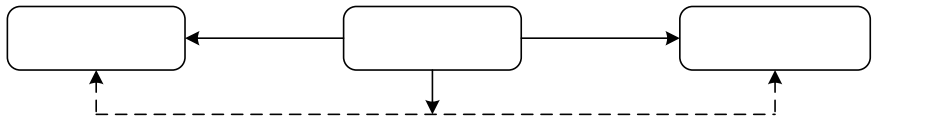
Peningkatan ekonomi lokal adalah bagian dari penguatan kemandirian masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pembuatan model percontohan. Telah dibuat model pertanian padi organic, budidaya lebah madu yang memperlihatkan kecenderungan membaik dalam hasil dan respon masyarakat. Beberapa upaya lain seperti peningkatan gula aren melalui introduksi uji coba alternative pembakaran dengan briket batu bara dan tungku hemat energi belum bisa berkembang baik, karena belum adanya kesesuaian dengan daya dukung sumber daya, ekonomi, material dan kultur masyarakat serta tidak seimbangnya antara hasil produksi dan biaya prosesnya.

1 Pelaksanaan Proyek:

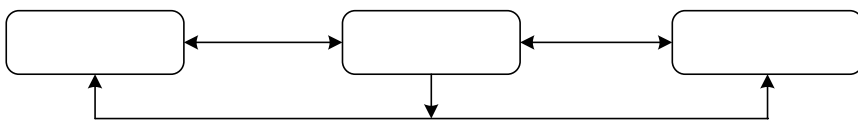
a. Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1. Sosialisasi	Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menginisiasi pelaksanaan program
2. Mengkatkan kesadaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan hutan- masyarakat aktif melakukan patroli pengamanan hutan,- menurunnya tingkat kerusakan hutan
3. Koordinasi inter- dan intra desa	Terbangunnya mekanisme penyelesaian masalah di internal desa serta jalinan kerjasama dengan desa lain
4. Lokakarya desa	<ul style="list-style-type: none">- Lokakarya Cibuluh mengenai 'Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam', diikuti seluruh komponen desa yang menghasilkan dokumen rencana tindakan tata kelola hutan;- Lokakarya di Dusun Mekaraksana mengenai kalender musim dan tata aturan penyelesaian konflik masyarakat;- Lokakarya di Desa Neglasari mengenai pelestarian sumber-sumber mata air (daerah tangkapan air)
5. Pemetaan zonasi	<ul style="list-style-type: none">- Adanya peta zonasi lahan di setiap desa- Maket Desa Cibuluh dan rencana kelola tata guna lahan yang dibuat dan dipahami masyarakat
6. Inventarisasi biologi dan masyarakat	Data biologi dan masyarakat terkumpul dan tersedianya system pengelolaan informasi berbasis GIS
7. Pengelolaan tata guna lahan	<ul style="list-style-type: none">- Adanya dokumen rencana tata kelola lahan Desa Cibuluh yang disepakati- Adanya kesepakatan pengaturan pancen berdasarkan kondisi lahan- Adanya rencana penyelamatan lahan komunal desa
8. Pembuatan aturan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">- Disahkannya Peraturan desa mengenai peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan;- adanya aturan pengelolaan lahan desa Cibuluh
9. Pelatihan mengenai institusi	Kemampuan dan kapabilitas masyarakat dalam hal pengelolaan institusi local meningkat, melalui: <ul style="list-style-type: none">- Training pembuatan tata tertib desa di lima desa;- Training pembuatan peraturan desa di lima desa;- Training pengelolaan satwa liar untuk Raksabumi di PPSC;- Training zonal mapping di Cipacet, Mekaraksana, Kikis, Pangkalan dan Hegarwangi
10. Menuatkan organization lokal	Organisasi masyarakat lokal terbentuk, diantaranya: <ul style="list-style-type: none">- Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pembibitan kayu,- KIARA (forum komunikasi warga untuk pelestarian hutan)- Raksabumi (satuan tugas inisiator pelaksana Peraturan Desa).
11. Training dan penguatan usaha ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none">- Training budi daya pohon aren, di Desa Cibuluh- Training budi daya lebah madu di Desa Gelarpawitan- Training pembuatan pupuk organik di Desa Cibuluh, Desa Neglasari, Pucakbaru, Gelarpawitan;- Dua kali training cara penanam kayu di Jatinganor,- Training budidaya anggrek di Bandung.- Terbentuknya inisiasi beberapa usaha ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan budidaya lebah madu
12. Monitoring dan evaluasi	Ada sistem monitoring dan evaluasi mandiri yang dilakukan masyarakat

Gambar 01. Skema proses pelaksanaan kegiatan



**PENC
TERINT**



Kondisi p

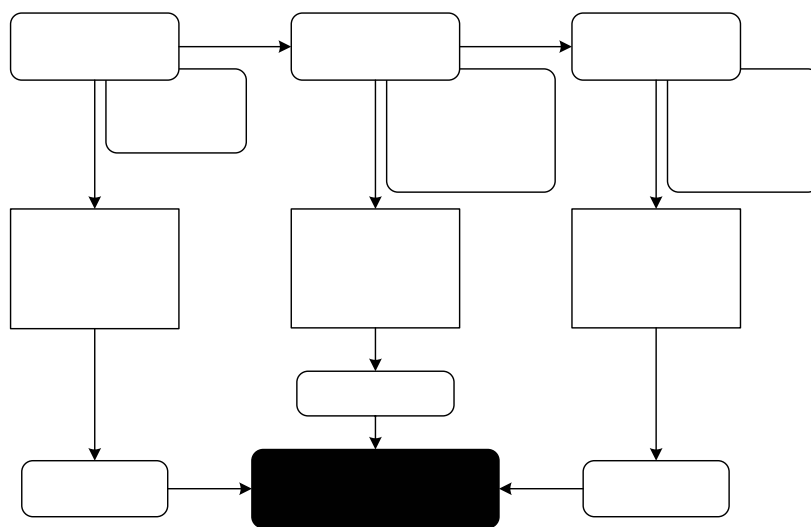
Hutan
(barang & jasa)

1. Sosialisasi program

Jalur sosialisasi program dilakukan melalui pertemuan formal, kemudian diskusi-diskusi informal pada kelompok masyarakat tertentu dan di tempat tertentu dan dalam rumah sebuah keluarga. Metoda sosialisasi formal yang diselenggarakan pihak desa adalah presentasi juga diskusi. Pertemuan formal biasanya dihadiri oleh aparat pemerintahan desa, aparat polisi kehutanan setempat, ulama dan tokoh masyarakat. Pertemuan informal dalam diskusi kelompok dilakukan di lokasi-lokasi kegiatan masyarakat seperti warung tempat jual beli kebutuhan masyarakat, lahan-lahan pertanian (sawah dan ladang), juga pada kelompok penyedia jasa transportasi lokal yaitu para tukang ojek (motor cycle rent). Sosialisasi di rumah sebuah keluarga dilakukan melalui diskusi sangat informal di depan tungku (metoda tungku*) sambil mencermati kebutuhan dan aktifitas harian masyarakat. Dari kegiatan sosialisasi diperoleh gambaran respon dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

Dari serangkaian sosialisasi yang dilakukan, penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan program sangat bervariasi. Pada pertemuan formal, masyarakat hanya menerima sebatas wacana pengetahuan dan kurang pelaksanaan secara nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat cenderung pasif dan masih sering muncul pengambil keuntungan individu (tokoh formal) bukan keuntungan kelompok atau komunitas. Tingkat partisipasi dari hasil diskusi kelompok lebih mengarah pada wacana yang menguntungkan kelompok tertentu, belum keuntungan komunitas. Ada sedikit keterbatasan sosialisasi pada kelompok yaitu kurang melibatkan setiap level komunitas. Kebanyakan kelompok profesi yang diajak berdiskusi didominasi oleh laki-laki dan kurang melibatkan perempuan. Sosialisasi yang paling efektif dilakukan adalah dalam ikatan keluarga melalui diskusi di depan tungku. Kelebihan sosialisasi di depan tungku adalah masyarakat cenderung lebih terbuka dan bisa berdialog dengan lugas mengenai permasalahan hutan dalam ruang lingkup kebutuhan keseharian mereka (figure 02).

Gambar 02. Skema jalur sosialisasi



* Metode Tungku adalah sebuah konsultasi public dengan pendekatan kultural masyarakat. Mekanisme pelaksanaannya lebih menonjolkan teknik bagaimana melibatkan proyek dalam kegiatan masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat yang digiring masuk ke dalam proyek (Lihat lampiran 1).

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi program menggunakan jalur formal dapat menghemat waktu, tetapi seringkali tingkat partisipasi masyarakat lemah atau bahkan palsu. Dapat dipahami bila pelaksanaan program yang hanya disosialisasikan pada tingkat formal saja akan berjalan tidak lancar karena penerimaan oleh masyarakat rendah, memunculkan ketergantungan dan berorientasi pada proyek sesaat. Sosialisasi ditingkat keluarga sangat berpeluang tercapainya partisipasi aktif bahkan mampu memunculkan *community self mobilisation*, tetapi waktu yang diperlukan menjadi lebih lama. Walaupun sebenarnya bisa dijumpai dengan menambah jumlah fasilitator di lapangan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat:

Pada dasarnya masyarakat memiliki fondasi kesadaran akan pentingnya pemeliharaan sumber daya hutan sebagai *system pendukung kehidupan*. Sayangnya kesadaran ini secara perlahan semakin surut bersamaan dengan semakin lemahnya ikatan rasa kepemilikan terhadap hutan. Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai dampak dari adanya sentralisasi pengelolaan oleh pemerintah pusat (Departemen Kehutanan). Lebih jauh, akibat sentralisasi adalah hilangnya otoritas masyarakat dalam pengelolaan hutan dan masyarakat diposisikan sebagai obyek dan bukan subyek dalam pengelolaan, melunturkan kearifan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan - sehingga cenderung *over-exploitation* - tidak adanya *system pengawasan* dan munculnya sikap apatis akibat dari rendahnya apresiasi pemerintah terhadap kearifan masyarakat lokal. Upaya penyadaran ditujukan untuk merangsang adanya proses reaktualisasi nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat dalam persepsi dan interaksi terhadap hutan. Hal ini menjadi landasan dalam mengembalikan otoritas pengelolaan hutan oleh masyarakat (*desentralisasi*). Rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui pertemuan formal yang ditindaklanjuti dengan pertemuan informal, mendorong menguatnya kesadaran kolektif melalui kegiatan pembibitan kayu dan membangun basis-basis kesadaran melalui ikatan keluarga.

Dari kegiatan penggalian informasi tentang nilai-nilai dan pengetahuan masyarakat dalam persepsi dan interaksi terhadap hutan, diperoleh informasi bentuk apresiasi yang menggambarkan adanya ikatan antara masyarakat dengan wilayah hutannya. Hal ini tergal melalui ungkapan kearifan budaya lokal: "*Gunung nu mawa linuhung, leuweung nu dipitineung, cai nu mawa hurip*" yang artinya kurang lebih gunung sebagai simbol keagungan, hutan tempat tautan rasa rindu, air sumber pembawa kesejahteraan. Dari ungkapan tersebut, beberapa hal yang bisa di tarik sebagai gambaran hubungan masyarakat dengan hutan dan lingkungan sekitar mereka, yaitu:

- Adanya ikatan identitas kewilayahan sebagai masyarakat pedesaan yang memiliki keagungan budi pekerti. Kondisi lingkungan dikaitkan menjadi simbol keluhuran martabat. Jika lingkungannya rusak maka akan rendah martabat masyarakat lokal yang berada di wilayah sekitarnya, begitu juga sebaliknya jika kondisi lingkungannya terpelihara maka masyarakat desa akan merasa tinggi martabatnya.
- Adanya ikatan emosional antara masyarakat dengan hutan yang memiliki nuansa kekhasan yang akan selalu diingatnya. Ikatan rasa ini terpaut pada suasana khas daerahnya seperti

keindahan panorama serta keanekaan kehidupan satwa yang ada didalamnya. Perasaan adanya ikatan ini terasa kuat muncul di masyarakat terutama setelah melihat kondisi hutan yang sudah tak utuh lagi. Masyarakat akan mengungkapkannya dengan perasaan rindu misalnya terhadap suara owa yang jarang terdengar lagi di perbukitan hutan di dekat kampungnya atau suara burung tertentu yang biasanya menyertai perjalanannya ketika melintas wilayah hutan.

- Adanya ikatan ketergantungan kebutuhan material kehidupan dengan wilayah hutan yang disimbolkan dengan air yang mengalir dari dalam wilayah hutan sebagai sumber pembawa kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Tergalinya informasi di atas sebagai gambaran ikatan kearifan masyarakat dengan wilayah hutannya, harus digaris bawahi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Selama ini, kebanyakan inisiatif kegiatan konservasi hutan di masyarakat sering tidak selaras dengan kepentingan masyarakatnya itu sendiri. Dari ketiga bentuk hubungan diatas, penguatan masyarakat dalam ikatan kebutuhan materil/ekonomi saja menjadi kontradiktif dengan ikatan lainnya. Contohnya dalam ikatan identitas di mana kebanggaan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukannya sering berbenturan dengan kepentingan ego kelembagaan dan atribut institusi pemerintah maupun LSM yang mendampinginya.

Pertemuan formal

Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pertemuan formal yang difasilitasi oleh aparat pemerintahan desa mulai tingkat Kedesunan sampai tingkat desa. Rata-rata tiap Kedesunan melakukan pertemuan formal untuk agenda penyuluhan ini sebanyak satu kali. Penyuluhan formal menyertakan pendamping sebagai pembicara disamping aparat desa, aparat kehutanan, tokoh masyarakat dan ulama setempat. Materi yang dibahas kebanyakan berupa pemahaman umum mengenai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dari sisi Undang Undang (UU No 23 Tahun 1997), kewajiban masyarakat untuk memelihara lingkungan yang ditinjau dari pendekatan ajaran agama, serta revitalisasi nilai nilai kearifan masyarakat dalam berinteraksi secara harmonis dengan alam. Hal yang didapatkan dari acara penyuluhan formal ini adalah munculnya niat awal dari masing-masing pihak untuk memulai langkah baru dalam memelihara hutan yang ditandai adanya pernyataan dan ajakan yang disampaikan tokoh formal.

Pertemuan Informal (Dialog)

Pertemuan informal berupa dialog spontan dengan kelompok diskusi tertentu dilakukan untuk menindaklanjuti perkembangan yang terjadi di masyarakat sebagai hasil penyuluhan formal. Diskusi atau dialog secara spontan terjadi di tempat berkumpul masyarakat, di warung-warung, di ladang dan di tempat mereka bekerja. Lokasi-lokasi yang diidentifikasi sebagai tempat pertemuan penyuluhan informal adalah:

1. Tempat berkumpul massa: kegiatan olah raga, kesenian, gotong royong
2. Kegiatan utama masyarakat: sawah, ladang, kebun, Talun, pangkalan ojek, warung
3. Ikatan keluarga (dengan pendekatan metoda 'tungku')

Dari penyuluhan di lokasi-lokasi tempat masyarakat beraktifitas dan berkumpul kemudian terjaring orang-orang yang mulai sadar akan pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Untuk penguatan kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif disalurkan ke dalam media kegiatan kolektif yang sesuai dengan misi pelestarian hutan dan lingkungan tempat hidup mereka, diantaranya pada tahap awal berupa pembibitan kayu.

Media kegiatan

Kelompok pembibitan kayu merupakan sarana yang ada untuk menguatkan kesadaran kolektif. Kelompok-kelompok pembibitan kayu yang dikenal dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mulai bermunculan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat. Kegiatan pembibitan kayu bersama menjadi proses seleksi awal untuk melihat keseriusan individu dan kelompok terhadap pelestarian hutan. Selanjutnya kegiatan kelompok berkembang membentuk forum diskusi-diskusi masyarakat yang membahas segala permasalahan mengenai pembibitan kayu yang kemudian dengan sendirinya mengarah juga pada masalah lingkungan dan hutan. Dari sisi kegiatan pembibitan kayu, saat menjelang seluruh project kegiatan berakhir, sudah lebih dari 200.000 pohon dari jenis kayu introduksi (sengon, surian, mahoni dsb) telah tertanam di lahan masyarakat.

Penguatan kelompok

Jauh sebelum terbentuknya kelompok-kelompok pembibitan kayu, proses eksploitasi hutan seperti penebangan liar dan perambahan untuk lahan pertanian telah berjalan begitu lama. Aliansi para eksploitor hutan telah tertata membentuk mata rantai kekuatan yang cukup berpengaruh di masyarakat. Kehadiran kelompok baru dengan kegiatan pembibitan kayu seperti melawan arus kebiasaan eksploitasi yang sudah lazim terjadi di masyarakat. Sejalan dengan semakin berkembangnya jumlah kelompok pembibitan kayu yang menjadi identik dengan misi untuk melestarikan hutan, reaksi berupa hambatan di tingkat lokal yang sebelumnya tidak begitu nampak mulai bermunculan. Beberapa benturan paham tak dapat dihindari dan meningkat menjadi sebuah konflik perseteruan di masyarakat. Muncul persaingan memperebutkan pengaruh untuk saling memperoleh dukungan dari masyarakat yang lebih luas. Dalam situsasi ini, kegiatan pendampingan yang dilakukan lebih mengarah pada membangun dukungan (aliansi) strategis, menaikkan moril masyarakat dan mengembangkan inspirasi pelestarian hutan.

Penguatan kelompok dilakukan dengan upaya promosi, yaitu membawa masyarakat dalam kegiatan pelatihan, seminar dan lokakarya dan studi banding ke luar daerah. Kegiatan ini cukup efektif untuk meraih dukungan (aliansi) strategis, menaikkan moril dan mengembangkan inspirasi. Misalnya, masyarakat menjadi lebih kuat secara moril ketika dalam satu studi banding berkesempatan bisa berdialog langsung dengan Bapak Letjen (purn) Solihin GP, mantan gubernur Jawa Barat. Masyarakat menjadi sadar bahwa urusan melestarikan hutan ternyata menjadi urusan nasional dan global serta yakin akan didukung oleh pihak-pihak yang lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan kelompok perambah di desanya. Rangkaian kegiatan kunjungan ke luar daerah menjadi sangat berarti bagi masyarakat untuk menguatkan semangat dan posisi tawar di tingkat lokal. Ketika mereka berada kembali di kampungnya, posisi politis kelompoknya semakin meningkat, bukan lagi sebagai kelompok kecil yang

melawan arus, tapi sudah menjadi bagian dari kelompok besar dalam misi pelestarian hutan yang telah mendapat dukungan dari banyak pihak.

Peningkatan kesadaran masyarakat dibuktikan dengan menurunnya perusakan hutan. Kesadaran individu yang diorganisir menjadi kesadaran komunitas mampu memunculkan aksi kolektif yang berdampak cukup luas. Proses membangun kesadaran komunitas yang memunculkan aksi kolektif membutuhkan kesabaran dan analisa psikologi massa yang cermat.

3. Loka karya Desa

Loka karya desa yang diadakan di desa Cibuluh diikuti oleh 116 orang peserta yang mewakili seluruh komponen masyarakat dan aparat Pemerintahan Desa. Awalnya rencana loka desa akan diselenggarakan hanya untuk wilayah satu desa yaitu desa Puncakbaru. Tetapi dalam hasil evaluasi perencanaan dengan masyarakat, muncul usulan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di lima desa sekaligus. Akhirnya masyarakat menyepakati tempat penyelenggaraan adalah di desa Cibuluh karena merupakan lokasi terdekat untuk dapat dijangkau oleh warga masyarakat empat desa lainnya.

Dalam loka desa ini berhasil dibangun kesepakatan dan kontrak sosial ditingkat yang lebih luas yang mencakup wilayah lima desa. Kekuatan masyarakat yang awalnya masih terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok wilayah kedusunan, menjadi bersatu membentuk kekuatan bersama di tingkat wilayah desa. Beberapa poin penting dari loka desa Cibuluh adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi adanya penggalian data potensi dan masalah secara partisipatif sebagai acuan perencanaan desa dalam mengelola wilayah secara terpadu.
- b. Terbangunnya kesepakatan antara masyarakat, pemerintahan desa dan pihak BKSDA untuk melakukan upaya penyusunan program pengelolaan hutan bersama
- c. Penggalangan kekuatan masyarakat melalui kelembagaan pemerintahan desa dalam misi penyelamatan hutan CA Gunung Simpang.

4. Pembuatan aturan pengelolaan, pelatihan institusi dan pengembangan organisasi

Aspek legalitas hukum yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan begitu penting untuk segera diwujudkan. Hal ini didorong pula oleh desakan penyelesaian konflik yang tengah terjadi di masyarakat dalam kegiatan yang sedang dilakukannya yaitu mengamankan hutan dari kegiatan penebang liar dan perambah lahan. Untuk mencapai tujuan di atas, kegiatan fasilitasi pembuatan peraturan desa menjadi sangat mendesak sebagai tindak lanjut perencanaan yang telah disepakati dalam loka desa Cibuluh. Hal tersebut dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Undang Undang Otonomi Daerah no 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kepada pihak pemerintahan desa yang meliputi aparat pemerintah desa, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat.
- b. Sosialisasi Undang Undang No 41 tentang Kehutanan, Undang Undang No 23 tahun 1997 tentang Lingkungan yang memuat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.
- c. Pelatihan pembuatan aturan Tata Tertib kelembagaan BPD untuk aparat Pemerintahan Desa dan anggota BPD agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hasil dari

pelatihan ini adalah sebuah Buku Tata Tertib BPD tiap desa yang menjadi prasyarat proses legal dalam pembuatan peraturan desa. Buku susunan Tata Tertib BPD yang telah dibuat merupakan yang pertama kalinya terwujud di wilayah Kabupaten Cianjur.

Proses pembuatan peraturan desa dilakukan dengan beberapa fase yang meliputi kegiatan:

- Pelatihan penyusunan draft peraturan desa
 - Musyawarah perumusan masalah yang hendak dimasukkan dalam Peraturan Desa
 - Musyawarah penyusunan redaksi bahasa dalam draft Peraturan Desa
- Peraturan dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap peraturan yang dibuat dapat terimplementasikan dan menjadi jalan keluar pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Sangsi hukum yang diterapkan lebih bersifat sangsi sosial, seperti berupa persidangan masyarakat yang memaksa si pelaku untuk mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya yang dituangkan dalam ikatan surat perjanjian. Penyelesaian kasus dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat ke RT-an, Kedesunan, sampai tingkat Desa. Jika penyelesaian masalah tidak mencapai sasaran, maka pihak desa mengajukannya langsung ke Kepolisian Negara tingkat Kecamatan sebagai jalan terakhir.
- Sosialisasi draft Peraturan Desa kepada masyarakat.
 - Persetujuan dan Pengesahan Peraturan Desa oleh seluruh anggota BPD dan pihak Pemerintah Desa. Prosesi ini disaksikan juga oleh segenap tokoh masyarakat desa.
 - Pembuatan surat Keputusan Kepala desa mengenai pembentukan sukarelawan masyarakat yang diberi nama Raksabumi^{*)} sebagai unit pelaksana Peraturan Desa. Peraturan Desa memuat pasal khusus mengenai pembentukan satuan tugas yang dinamakan Raksabumi sebagai instrumen pelaksana dalam kegiatan penjagaan hutan. Pembentukan satuan tugas ini disahkan berdasarkan surat keputusan Kepala Desa, sehingga lebih menguatkan aspek legal di tingkat lokal untuk mengakui keberadaannya.
 - Acara pelantikan anggota Raksabumi di setiap desa secara terbuka dan meriah berikut undangan aparat kehutanan, sekaligus menandai dimulainya fase baru kebijakan pengelolaan hutan di tingkat lokal desa.
- Adanya Peraturan Desa serta terbentuknya Raksabumi sebagai satuan tugas masyarakat dalam menjaga hutan, merupakan tonggak sejarah baru bagi masyarakat dan menjadi sebuah model tersendiri untuk tujuan penguatan peranan masyarakat lokal dalam upaya penyelamatan hutan.
- Pelatihan yang diikuti oleh anggota Raksabumi dalam pengembangan kapasitas internalnya ialah :
 - Pelatihan dan penyuluhan pentingnya pelestarian satwa liar yang diadakan secara gabungan anggota raksabumi di lima desa di PPSC Sukabumi dan pembekalan mental secara khusus dari tokoh masyarakat Jawa Barat yang dikenal peduli dengan kegiatan pelestarian hutan.

^{*)} Raksabumi adalah nama satuan tugas masyarakat untuk perlindungan hutan yang anggotanya sebanyak 10 orang di setiap desa. Arti harfiah Raksabumi bersal dari dua kata yaitu *Raksa*= menjaga dan memelihara, dan *bumi*= alam atau tempat tinggal. Jadi raksabumi secara harfiah bermakna sebuah upaya menjaga dan memelihara alam. Satuan tugas Raksabumi Desa bertugas memantau hutan dan keanekaragaman hayatinya serta sumber mata air. Mereka berwenang untuk mengadakan penyuluhan, memproses pelanggaran mulai tingkat RT, Dusun, Desa sampai melimpahkan ke pihak kepolisian

- Pelatihan keterampilan teknik pembibitan kayu dan tanaman yang diselenggarakan pihak DPKLTS di Sumedang Jawa Barat dimana pesertanya adalah perwakilan masyarakat di seluruh kabupaten di Jawa Barat.

Adanya model pembuatan peraturan desa sekaligus mekanismenya mencerminkan kemandirian posisi masyarakat. Pelaksanaan peraturan desa telah menjadi tekanan kuat yang mampu mendorong pihak aparat BKSDA untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam dua tahun terakhir ini pihak BKSDA telah melakukan perbaikan dalam struktur organisasi pengelolaan mereka. Sangsi teguran dan mutasi telah diberlakukan terhadap aparat yang ditugaskan di lapangan. Selama masa program dilakukan, pihak BKSDA telah dua kali melakukan operasi gabungan pengamanan hutan, sebuah tindakan yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Peraturan desa yang lahir dari partisipasi dan kebutuhan masyarakat Gn Simpang menjadi peraturan desa yang pertama terwujud di Jawa Barat. Ketika YPAL mempromosikannya kepada lembaga swadaya masyarakat melalui e-mail, Peraturan Desa ini mendapat apresiasi yang cukup tinggi dan telah menjadi acuan/referensi oleh beberapa LSM yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Peraturan desa tersebut menjadi inspirasi bagi kerja-kerja penyelamatan lahan hutan di beberapa kawasan konservasi Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Di Jawa Barat, Perdes tersebut telah diadopsi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Cagar Alam Takokak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada bulan April 2004, rombongan dari Unit Pengelola Kawasan Hutan Sungai Wain di Balik Papan, Kalimantan Timur telah mengundang masyarakat Gn Simpang ke Bogor untuk berdialog langsung mengenai upaya penyelamatan hutan oleh masyarakat.

5. Koordinasi Inter dan intra Desa

Koordinasi inter dan intra village mulai dilakukan ketika kesadaran kolektif masyarakat meningkat. Koordinasi ini paling jelas terlihat dalam upaya penyelesaian masalah antar desa dan di dalam wilayah desa itu sendiri. Menguatnya kelembagaan desa menjadi pendorong koordinasi antar desa karena semuanya dikaitkan dengan mekanisme birokrasi pemerintahan desa. Hanya saja koordinasi yang dimotori oleh pemerintahan desa memunculkan kendala yang cukup sulit diatasi oleh pihak lain ketika terjadi kemandegan koordinasi ditingkat pemerintahan desa, karena mekanisme kontrol dan perbaikannya menjadi tergantung dalam wadah birokrasi lembaga desa itu sendiri. Masih ada orientasi kuat dari pemerintahan desa yang untuk menganut jalur koordinasi vertikal ke tingkat lembaga pemerintahan yang di atasnya daripada koordinasi secara horisontal dengan pihak pemerintahan desa lainnya. Oleh karena itu pada beberapa kasus, kerjasama untuk penyelesaian masalah oleh masyarakat tetap dilakukan walaupun tidak melalui prosedur kelembagaan desa.

Beberapa contoh kejadian telah menunjukkan adanya koordinasi penyelesaian masalah antar desa sebagai berikut :

- Koordinasi antara Pemerintahan Desa Puncakbaru dan Desa Mekarjaya dalam penyelesaian masalah penanganan 8 orang warga kampung Ciratal desa Mekarjaya yang tertangkap oleh masyarakat Kedusunan Batuireng dalam kasus penebangan liar di Blok Gn Batu wilayah hutan CA Gn Simpang. Pelaku adalah warga Desa Mekarjaya dengan diantar

oleh aparat desanya mengakui perbuatannya dan berjanji secara tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya.

- Koordinasi antara Pemerintah Desa Puncakbaru dan Desa Cibuluh dalam penyelesaian masalah perambahan hutan lindung Gn. Malela wilayah desa Cibuluh yang dilakukan oleh warga Kedusunan Cikupa Desa Puncakbaru. Penyelesaian tidak menemui titik terang karena pelaku tidak mau jujur. Akhirnya kedua pelaku perambahan tersebut harus mendekam di ruang tahanan Kepolisian Cidaun selama satu minggu sebelum jera.
- Koordinasi antara Pemerintah Desa Cibuluh dan Desa Neglasari untuk menata ulang wilayah perbatasan kedua desa, dan wilayah kelola hutan di daerah perbatasan tersebut.
- Koordinasi antara Pemerintah Desa Cibuluh dengan Pemerintah Desa Neglasari dalam penanganan masalah perambahan hutan yang dilakukan oleh warga desa Cibuluh di wilayah hutan Desa Neglasari. Pemerintah Desa Neglasari menyerahkan kasus ini untuk dapat ditangani sendiri oleh pihak Desa Cibuluh dengan menyerahkan data pelaku serta barang bukti alat perambahan hutan yang berhasil disita.
- Peranan Raksabumi yang ada di setiap desa adalah sebagai inisiator untuk menggalang koordinasi antar desa, juga antar warga masyarakat di suatu desa. Raksabumi di setiap desa telah memiliki jadwal pertemuan untuk mengevaluasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas mereka. Misalnya di Desa Neglasari minimal setiap tiga minggu satu kali melakukan patroli yang melibatkan warga desa Neglasari

Disamping koordinasi inter dan intra desa, saat ini ada perkembangan baru yang cukup menggembirakan, yaitu masalah kehutanan sudah masuk menjadi salah satu agenda dalam kegiatan evaluasi bulanan pada pertemuan tingkat kepala desa se-Kecamatan Cidaun. Kegiatan masyarakat mengenai pengamanan hutan mendapat dukungan yang positif dari pihak kepolisian sektor kecamatan Cidaun, Cianjur. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi telah dilakukan masyarakat sampai ke tingkat kecamatan.

6. Inventarisasi biologi dan kemasyarakatan

Hasil kajian biologi

Telah dicacah areal hutan seluas 1,2 ha di tiga tipe vegetasi utama (Hutan Dataran Rendah, Hutan Submontana dan Hutan Montana) yang menyusun kawasan hutan CA Gn. Simpang. Dalam pelaksanaannya inventarisasi dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan peneliti dari YPAL dengan tujuan transfer pengetahuan teknik-teknik pengumpulan data flora agar masyarakat dapat melakukannya sendiri di masa mendatang.

Telah dicacah sebanyak 180-an jenis tumbuhan untuk tingkat pohon (tree) dan belta (pool) yang terdapat di dalam 12 petak contoh seluas masing-masing 0,1 ha. Jenis pohon yang paling banyak tercacah adalah Hiur sebanyak 110 pohon, tapi hanya terbatas di tipe vegetasi Hutan Montana, sedangkan jenis tumbuhan yang ketersebarannya paling merata adalah Pasang *Quercus* sp dan Ipis Kulit *Kibessia azurea* di enam lokasi cuplikan, diikuti oleh Puspa *Schima wallichii*, Ki Padali, Ki Manjel *Gordonia excelsa*, Kawoyang *Litsea elliptica* dan Rasamala *Altingia excelsa* masing-masing terdapat di lima lokasi. Walaupun begitu, vegetasi Gn Simpang didominasi oleh familia Lauracea, kemudian diikuti oleh Fagaceae, Euphorbiaceae dan Myrtaceae berturut-turut.

Setiap plot, ternyata unik, terlihat dari korelasi antar plot dan lokasinya (cluster analysis) yang sangat rendah, bahkan apabila kita lihat dari koefisien Mischungs (“Q”), empat lokasi, yang merupakan cuplikan di Hutan Dataran Rendah dan Hutan Submontana, mempunyai nilai koefisien di bawah 2, yang berarti bahwa di setiap lokasi bisa diharapkan setiap pohon merupakan jenis yang berbeda. Kecuali untuk dua cuplikan lain yang merupakan cuplikan di Hutan Montana, mempunyai nilai Mischungs yang cukup tinggi (3,53 dan 4,92) yang berarti bahwa setiap empat pohon dalam plot jenisnya sama. Dari hasil analisa diatas diketahui bahwa komposisi vegetasi CA Gn Simpang cukup beragam.

Survai fauna di Cagar Alam Gunung Simpang telah dilakukan di enam lokasi yaitu di Gn. Baduga, Gn. Kuning, Cihanjawa, Gn. Walang, Gn. Kuda dan Puncak Gupitan. Survai ini lebih difokuskan untuk melihat struktur komunitas burung di Cagar Alam Gunung Simpang sedangkan fauna lainnya hanya dicatat keberadaannya. Untuk mengetahui struktur komunitas burung dilakukan dengan menggunakan metode transek yang dilakukan pada pagi dan sore hari selama dua hari setiap lokasi, sedangkan untuk inventarisasi fauna lainnya dilakukan dengan menjelajahi setiap lokasi selama satu hari. Pengambilan data dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi dengan dibantu oleh peneliti dari YPAL.

Dari hasil survai selama 26 hari di lokasi penelitian ditemukan sebanyak 116 jenis burung, 14 jenis mammalia, 2 jenis amphibi dan tiga jenis reptil. Jumlah jenis burung yang terbanyak terdapat di Gn. Walang sebanyak 60 jenis burung. Jenis-jenis burung yang menarik keberadaannya diantaranya adalah elang jawa (*Spizaetus bartelsi*) dan koncer (*Harpectes reinwardti*) yang merupakan jenis burung endemik jawa. Dari 14 jenis mammalia terdapat 4 jenis primata dimana 3 jenis diantaranya perlu diperhatikan keberadaannya karena jumlahnya yang semakin menurun, ketiga jenis tersebut adalah owa jawa (*Hylobates moloch*), surili (*Presbytis comata*) dan lutung (*Trachypithecus auratus*). Jenis lainnya dari mammalia yang menarik perhatian adalah macan tutul (*Panthera pardus*) dimana hewan ini merupakan top predator. Terdapat beberapa jenis hewan yang dianggap sebagai hama oleh penduduk yaitu begu (*Sus sp*), monyet (*Macaca fascicularis*) dan piit (*Lonchura leucogastroides*).

Kecenderungan sikap masyarakat dari hasil kegiatan inventarisasi biologi adalah adanya penguatan apresiasi mereka terhadap potensi keragaman flora dan fauna yang ada di hutan. Meskipun masyarakat tidak secara utuh memahami tujuan akhir dari kegunaan hasil penelitian ini, secara pasif mereka bisa menyimpulkan bahwa apa yang ada di hutan sekitar mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Proses ini berjalan ketika untuk pertama kalinya masyarakat bersentuhan langsung dengan wilayah hutan dalam sudut pandangan dan posisi yang berbeda dari kebiasaan mereka sebelumnya.

Inventarisasi sosial ekonomi masyarakat

Dari hasil kajian kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lima desa sekitar Gunung Simpang, secara umum diketahui bahwa kelima desa tersebut memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama, yaitu berasal dari desa yang sama. Kelima desa yang dikaji merupakan hasil pemekaran dari Desa Cibuluh yang memiliki wilayah sangat luas. Dalam alur sejarah pun, kelima desa ini memiliki alur yang berkaitan satu sama lain, dimana penduduk desa yang satu mengenal alur sejarah desa yang lain. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Desa Cibuluh pada masa lampau menjadi bagian sejarah bagi kelima desa tersebut.

Adanya kesamaan latar belakang ini belum disadari masyarakat sepenuhnya sehingga masyarakat belum memanfaatkannya sebagai suatu motivasi bagi keberlanjutan kehidupan sosial maupun ekonomi. Umumnya masyarakat golongan muda sangat sedikit memahami sejarah desa mereka, hal ini terlihat dari dominasi golongan tua yang dalam memberikan informasi mengenai sejarah maupun perubahan-perubahan yang ada. Berbagai faktor yang bisa menyebabkan mereka 'kurang bersuara', diantaranya budaya ataupun minimnya pengetahuan mereka tentang sejarah desa.

Pertanian merupakan mata pencaharian yang dominan di kelima desa tersebut dimana mayoritasnya adalah sawah tadah hujan yang hanya bisa diolah satu kali dalam satu tahun (musim). Umumnya masyarakat juga menyadari akan kondisi lahan pertanian yang dimiliki penduduk semakin menyempit seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun demikian proporsi lahan pertanian lebih banyak dibandingkan lahan *darat*. Adanya kecenderungan ketergantungan terhadap penggunaan pupuk yang disadari sebagian masyarakat tidak terlalu meningkatkan hasil pertanian mereka namun lebih menekankan pada perolehan hasil yang tetap dari setiap kali musim tanam. Selama satu musim, masyarakat memanfaatkan waktunya untuk mengolah sawah, mempersiapkan lahan kebun dan sisanya yaitu pada musim kemarau, tidak ada kegiatan. Gula aren, minyak kelapa, beras merupakan potensi yang belum diusahakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari segi pemasarannya yang masih bersifat individu atau dengan perantara bandar yang tidak terdapat di semua desa. Cibembang, Selaawi, Torowongan, Cilondok-Ciwidey (Bandung) adalah titik-titik utama yang dijadikan tempat tujuan untuk pemasaran hasil pertanian dan kebun masyarakat sekitar CAGS. Sistem pemasaran yang umumnya melalui beberapa tangan terlebih dahulu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penduduk merasakan pendapatan mereka tidak mengalami peningkatan. Tidak adanya upaya untuk pengkolektifan dalam penjualan hasil pertanian maupun hasil kebun terlihat cukup menyulitkan penduduk. Dalam hal ini diperlukan peran berbagai pihak baik aparat desa maupun masyarakat sendiri untuk bersama-sama memecahkannya.

Kecenderungan perubahan perilaku masyarakat

Dengan mengacu pada faktor pendorong perubahan dari segi perkembangan penduduk, kebijakan pemerintahan dan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang tidak mendukung usaha pertanian, serta rendahnya kapasitas mengelola lahan pertanian, telah menciptakan beberapa kecenderungan perubahan perilaku di bidang sosial ekonomi sebagai berikut:

1. Perubahan orientasi masyarakat dari mata pencaharian utamanya sebagai petani menjadi buruh migran atau menggeluti pekerjaan baru yang tidak berbasis pertanian. Tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk dibandingkan dengan kapasitas daya dukung sumber daya yang ada turut menggeser pilihan berkerja. Profesi baru yang banyak digeluti oleh kaum muda laki-laki yaitu penyedia jasa angkutan ojeg di wilayahnya atau menjadi pekerja kasar paruh waktu di perkotaan. Kaum perempuan muda lebih tertarik mengambil resiko menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri untuk mendapatkan upah yang lebih besar dengan meninggalkan peluang usaha tani dan mengurus keluarga.
2. Perilaku sosial antar individu masyarakat terhadap sesama komunitasnya menjadi semakin individualistis. Hal ini dipengaruhi oleh semakin kompleksnya tingkat kebutuhan hidup

masyarakat dan meningkatnya persaingan hidup di internal masyarakat. Masyarakat dalam hal tertentu lebih aktif mencari jalinan sosial dengan komunitas lain di luar daerahnya.

3. Jumlah pendatang baru dari luar daerah tergolong sedikit, tetapi secara kualitas telah banyak mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif, terutama untuk kalangan usia muda. Perubahan gaya hidup konsumtif ini dipengaruhi juga oleh semakin tinggi intensitas masyarakat berinteraksi dengan budaya perkotaan. Ketika masyarakat memasarkan hasil pertaniannya, mereka akan pergi ke kota dan tentu saja lokasi utama yang mereka kunjungi adalah terminal dan pasar. Budaya terminal dan pasar adalah bagian yang paling intens di terima masyarakat dan menjadi bahan bawaan baru ketika mereka kembali ke desanya.

Ketiga perubahan di atas telah mendorong semakin menurunnya keterikatan dan apresiasi masyarakat terhadap wilayah kampung halamannya.

7. Pemetaan Zonasi (Zonal Mapping)

Zonal mapping adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mendorong masyarakat lebih memahami potensi wilayah kelola mereka. Kegiatan ini mulai dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Mekaraksana Desa Cibuluh yang kemudian diikuti oleh dusun-dusun lain di Desa tersebut. Dalam pelaksanaannya, selain masyarakat sebagai pelaku utama juga aparat Desa Cibuluh ikut terlibat.

Proses pelaksanaan kegiatan pemetaan bersama masyarakat adalah sebagai berikut:

1. sosialisasi
2. mengeksplorasi materi yang akan dipetakan
3. membuat peta sketsa
4. training dan simulasi
5. proses pemetaan
6. monitoring

Selain dengan survey lapangan, dilakukan pula analisa peta bersama masyarakat. Survey pemetaan berupa pengukuran lahan dilakukan masyarakat secara bertahap berdasarkan kesepakatan bersama.

Dari beberapa pertemuan dengan masyarakat yang membahas hasil pemetaan, telah berhasil dideskripsikan mengenai tata guna lahan, status lahan, kemiringan lereng, dan zona kerentanan gerakan tanah. Hasil pemetaan ini digunakan oleh masyarakat dan aparat Desa untuk dapat menganalisa potensi lahan yang ada dan mengatasi permasalahan-permasalahan lahan, diantaranya :

1. penyelamatan dan pemanfaatan lahan desa / komunal
2. klasifikasi pancen (pajak mandiri desa) dan membuat mekanisme pancen yang lebih baik
3. akurasi dalam pengukuran lahan milik atau lahan desa sehingga mampu mereduksi konflik lahan antar anggota masyarakat.
4. teridentifikasinya lahan kritis sebagai langkah awal untuk konservasi lahan.

8 Pengelolaan tata guna lahan (Landuse management)

Dari hasil pemetaan sementara yang dilakukan masyarakat Desa Cibuluh telah diperoleh data dan gambaran tentang kondisi lahan-lahan yang ada, diantaranya:

1. berhasil diperinci lahan desa/komunal: lokasi, kondisi, fungsi, dan permasalahannya.
2. Teridentifikasi tata guna lahan milik masyarakat.
3. Teridentifikasi lahan-lahan yang rentan terhadap gerakan tanah.

Hasil pemetaan lahan dibahas dalam loka desa yang diikuti masyarakat empat kedesunan di Desa Cibuluh dan aparat desa. Beberapa kebijakan lahir dalam loka desa seperti sebagai berikut :

1. Penggunaan lahan desa untuk kepentingan pribadi dikenakan kompensasi yang besarnya didasarkan pada luas lahan dan lama waktu penggarapan.
2. Penyerobotan atau penggunaan lahan tanpa izin dikenakan sanksi.
3. Besar pancen ditentukan berdasarkan luas lahan yang dimiliki dan tingkat kesuburannya
4. Beberapa aturan pencegahan mendirikan rumah/bangunan pada kemiringan tertentu (>40%)

9 Pelatihan dan penguatan usaha ekonomi

Program ini direncanakan dengan pendekatan pola satu daerah satu unggulan, artinya tiap desa dibangun ciri khas produksi yang dihasilkannya. Pendekatan mengembangkan keunggulan potensi tiap desa atau wilayah ini diharapkan masing-masing desa akan menjadi sentra-sentra produksi yang berbeda dan mengurangi persaingan internal.

Pelatihan padi organik dan Percontohan Pertanian Organik

Upaya untuk penguatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pertanian yang ramah lingkungan dilakukan melakukan kegiatan training pembuatan pupuk organik. Tindak lanjut dari pelatihan ini adalah membuat proyek percontohan pertanian padi dengan menggunakan pupuk organik. Pengambilan metode proyek percontohan ini ditujukan untuk merangsang petani lain untuk beralih dari pola bertani menggunakan pupuk kimia diganti dengan pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia untuk padi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dirubah, meskipun sebenarnya para petani sadar akan kesulitan menanggulangi mahalnya biaya pengadaan pupuk kimia yang dipasok dari luar daerah.

Inisiasi awal pembuatan lahan percontohan dimulai dari penggalan pengetahuan yang ada pada petani lokal, tanpa terbebani terlebih dahulu oleh upaya untuk belajar mengetahui metode pemupukan yang lain. Untuk menanggulangi kekhawatiran resiko gagal panen, YPAL membuat kesepakatan penjaminan mengganti selisih penurunan hasil produksi, bila ada.

Lokasi proyek percontohan padi organik :

No	Lokasi	Pemilik	Luas (m ²)	Varietas Padi
1	Neglasari (Ranca Kole)	Kuyun	2500	Hawara manis
2	Cibuluh (Mekarlaksana)	Rasman	2200	Sari kuning (1000 m ²) dan Ancrit (1200 m ²)
3	Puncak Baru (Batu Ireng)	Ramlan	8000	Ketan
4	Mekarjaya (Cibitung I)	Karman	3600	Hawara manis
5	Mekarjaya (Cibitung II)	Sopandi	1600	Ancrit

Proyek percontohan padi organik oleh masyarakat dianggap berhasil. Meskipun hasil panen padi organik tidak bisa melampaui jumlah yang biasa diperoleh ketika menggunakan pupuk kimia, kenyataannya dalam waktu yang bersamaan secara umum sedang terjadi penurunan produksi cukup besar sampai ke tingkat kegagalan panen yang disebabkan serangan hama. Dampak positif dari adanya keberhasilan proyek percontohan di Rancakole telah merangsang petani lain untuk tidak menggunakan pupuk kimia. Tingkat antusiasme masyarakat tercermin dari hasil pertemuan evaluasi dengan masyarakat di sekitar lokasi percontohan.

Pelatihan Budi Daya Lebah Madu

Pelatihan budi daya lebah madu diinisiasi di desa Gelarpawitan dimana banyak terdapat para pencari “odeng” dari hutan yang dilakukan secara musiman. Proyek percontohan budi daya madu dikelola oleh anggota Satgas Raksabumi. Proses kegiatan inisiasi budi daya madu adalah sebagai berikut :

- o Pembuatan percontohan dengan membuat 10 buah kotak lebah madu yang masing-masing akan dibagikan kepada anggota Satgas Raksabumi desa Gelarpawitan.
- o Inisiasi budidaya lebah madu dengan pengetahuan lokal yang sudah ada.
- o Pelatihan budidaya lebah madu serta proses produksinya.
- o Sosialisasi lebih luas kepada masyarakat.
- o Dokumentasi kegiatan.
- o Penyebaran informasi kepada masyarakat dengan media-media seperti brosur, pamflet, buku-buku dan sebagainya.

10 Monitoring dan evaluasi

Monitoring Pengelolaan project

Kegiatan	Kelemahan	Kekuatan
1. Sosialisasi program	Perlu waktu, melewati tiga tingkat sosialisasi yaitu formal, informal dan keluarga	Tingkat partisipasi masyarakat tinggi, terutama dari sosialisasi di tingkat keluarga
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat	Perlu waktu, tiga tingkat yaitu formal, informal dan keluarga	Kesadaran masyarakat tinggi
3. Koordinasi inter-dan intra-Desa	Masih insidentil, tidak terprogram dengan baik	Dilakukan mandiri oleh masyarakat
4. Loka karya Desa	Implementasi ditingkat masyarakat	Muncul keswadayaan masyarakat
5. Pemetaan Zonasi (zonal mapping)	Persiapan, pengorganisasian, pemahaman kebutuhan lahan	Muncul keswadayaan masyarakat
6. Inventarisasi biologi dan sosial ekonomi masyarakat	Belum sepenuhnya melibatkan masyarakat	Terjadi sharing pengetahuan, kebanggaan masyarakat
7. Pengelolaan tata guna lahan	pelaksanaan zonal mapping	penyelamatan lahan komunal desa
8. Management rules establishment	Sosialisasi dan implementasi belum menyeluruh	Legalisasi kesepakatan masyarakat
9. Trainin institusional	koordinasi di tingkat pelaksana	Sesuai kebutuhan masyarakat
10.Mndirikan organisasi lokal	Promosi, dukungan kurang	Muncul keswadayaan masyarakat
11.Training dan penguatan usaha ekonomi lokal	Belum kepada training pemasaran, survey pasar	Dilakukan dilokasi, ada proyek percontohan
12.Monitoring dan evaluasi	Dokumentasi lemah	Monitoring oleh masyarakat

Monitoring dan evaluasi di lapangan oleh masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat yang dibangun mulai dari tingkat keluarga kemudian menjalar ke tingkat komunitas telah mendorong munculnya system monitoring secara mandiri (*self monitoring system*). Sayangnya, kegiatan mereka dalam memantau (memonitoring) berjalannya program sering kali tidak tercatat dengan baik, apalagi ketika pendamping lapangan tidak sedang berada di tempat. Selain kebiasaan masyarakat dalam mencatat proses masih terbatas, mereka juga merasa hasil pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti langsung di lapangan bukan hal yang perlu diinformasikan kepada pendamping. Berikut ini beberapa tindakan yang terekam yang dapat menggambarkan system monitoring dan evaluasi mandiri masyarakat.

- Adanya kegiatan saling mengoreksi antar kelompok masyarakat, maupun antar kedesunan ketika dianggap kesepakatan yang telah diputuskan bersama tidak dijalankan oleh sebuah kelompok atau sebuah kedesunan. Misalnya telah terjadi kemandekan dalam proses pembibitan kayu di dusun Batu ireng. Dengan sendirinya masyarakat dari Dusun Mekarlaksana Desa Cibuluh mendatangi masyarakat Batuireng dan berdiskusi mencari pemecahan kemandegan tersebut.
- Masih dalam hal pembibitan kayu oleh masyarakat, Seorang penduduk Batuireng melihat kegiatan tersebut belum dilaksanakan oleh dusun Cikupa, maka dia dengan sendirinya mendatangi kedesunan tersebut dan memberikan bibit kayu untuk di semai oleh masyarakat Cikupa.
- Kegiatan patroli hutan. Masyarakat Desa Neglasari melihat bahwa belum terjadi kekompakan di Desa Cibuluh dalam pengamanan hutan, maka masyarakat Desa Neglasari mendatangi pemerintahan desa Cibuluh untuk bersama-sama melakukan kegiatan patroli
- Patroli hutan di desa Puncak Baru. Setelah masyarakat gencar melakukan patroli hutan, kegiatan para penebang kayu beralih dari siang hari ke malam hari. Malihat perubahan waktu pencurian kayu tersebut, beberapa masyarakat Batuireng melakukan patroli malam hari dan berhasil membekuk pencuri kayu
- Masyarakat merasa bahwa penyelesaian pencurian kayu yang ditangani petugas kehutanan dan kepolisian setempat seringkali tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu mereka mengadakan penyelesaian penanganan pencurian kayu dengan memprosesnya di tingkat persidangan local. Selama masa-masa penanganan pencurian tinggi telah berlangsung beberapa kali persidangan local yang tidak terekam oleh pendamping lapangan
- Pada waktu loka desa Cibuluh, masyarakat melihat bahwa permasalahan hutan bukan urusan satu desa, oleh karena itu mereka mengusulkan untuk melakukan loka desa yang mencakup lima desa yang berdekatan, termasuk melibatkan seluruh aparat pemerintahan desa agar mendapat dukungan yang lebih kuat dari lembaga desa.
- Proses penilaian kinerja Raksabumi. Masyarakat Desa Gelarpawitan menemukan adanya pelanggaran oleh seorang anggota Raksabumi, maka dalam sebuah pertemuan desa, masyarakat memecat anggota raksabumi yang bermasalah tersebut dan menggantinya dengan pilihan mereka. Proses yang sama terjadi juga di Desa Cibuluh
- Kegiatan pemetaan partisipatif. Penduduk Dusun Mekarlaksana telah melaksanakan pemetaan dan melihat di kedesunan lain kegiatan pemetaan ini tidak berjalan lancar. Masyarakat Mekarlaksana segera mendatangi kedesunan yang terhambat dalam pelaksanaan pemetaan dan kemudian membantunya.

b. Keluaran (Out put)

Hasil-hasil pelaksanaan proyek yang penting adalah adanya kesepakatan masyarakat untuk membuat aturan pemeliharaan hutan yang kemudian dapat diimplementasikan oleh mereka. Beberapa dokumen dapat menunjukkan hasil dari proyek ini diantaranya adalah:

- dokumen prosiding loka desa Cibuluh yang isinya adalah rangkaian proses penggalian potensi dan masalah, juga perencanaan desa untuk melestarikan hutan yang dibangun dari kesepakatan masyarakat
- dokumen Tata Tertib BPD, sebagai hasil dari penguatan kelembagaan desa. Dokumen ini milik desa dan menjadi acuan desa untuk membuat peraturan desa
- dokumen peraturan desa untuk setiap desa
- film documenter kegiatan masyarakat sebagai materi penunjang yang menggambarkan proses pelaksanaan proyek dan aktifitas masyarakat mulai dari perencanaan desa, pembuatan peraturan desa sampai pengesahan Raksabumi. Film documenter ini ada di setiap desa
- dokumen hasil penelitian flora dan fauna, ada di setiap desa sebagai acuan masyarakat untuk mengenai kondisi hutan
- dokumen hasil riset social ekonomi desa
- dokumen data GIS
- dokumen pemetaan partisipatif

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

Mengacu kepada tujuan utama untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang didorong dengan upaya penguatan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya, beberapa kendala dan hambatan yang berkaitan dengan upaya diatas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Lemahnya kapasitas dan tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk menjadi pemeran utama pengelolaan hutan yang ada di wilayah mereka
2. Lemahnya posisi dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat dan dilegalisasi dalam bentuk Undang-undang, misalnya penentuan otoritas desa dalam pengelolaan hutan
3. Lemahnya ikatan antar individu dan komunal dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat respons dan partisipasi masyarakat
4. Lemahnya kelembagaan desa sebagai intitusi resmi masyarakat local yang sedikit sekali melayani masyarakatnya tetapi lebih banyak mengabdikan pada atasannya.
5. Kuatnya dominasi kebijakan status quo pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan. Di lapangan, tingkat dominasi semakin terasa oleh masyarakat ketika mereka mulai melaksanakan program. Petugas lapangan pengelola hutan merasa terancam posisinya ketika masyarakat mulai melakukan patroli hutan. Mereka merasa akan kehilangan kekuasaan dan terutama penghasilan-penghasilan illegal yang selama ini mereka dapatkan

d. Tindakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi

1. Untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat, dilakukan langkah-langkah penguatan ikatan hubungan kearifan masyarakat dengan hutan dengan metode pendekatan kepada masyarakat yang bersifat ethno-spiritual seperti reaktualisasi nilai-nilai budaya, religi dan pengetahuan lokal sebagai basis faktor perubahan perilakunya terhadap lingkungan. Menanamkan hak-hak masyarakat akan lingkungan yang sehat
2. Untuk meningkatkan posisi dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat dilakukan upaya mendorong masyarakat untuk menambah pengetahuan baik dengan cara mengirimkan berbagai informasi kepada mereka maupun di ajak ke luar komunitasnya dengan mengirim mereka ke lokasi-lokasi ajang pelatihan, studi banding ke, ke pertemuan dengan komunitas yang lebih luas di luar desa mereka, termasuk pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas mereka di bidang pertanian
3. Untuk meningkatkan ikatan komunal masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah lebih memfokuskan sosialisasi dan penyadaran terhadap pada tingkat keluarga.
4. Untuk meningkatkan peranan kelembagaan desa, selain pelatihan pembuatan tata tertib desa dan peraturan desa, para kepala desa diajak untuk mengikuti pertemuan dan studi banding ke beberapa institusi, seperti seminar perencanaan daerah yang diselenggarakan oleh Institute Pertanian Bogor (IPB), dan kunjungan ke Pusat Informasi Lingkungan (LSM) di Bogor.
5. Untuk menurunkan dominansi pemerintah pusat dalam hal pengelolaan hutan, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengikutsertakan petugas jagawana lapangan dalam setiap pertemuan masyarakat desa, untuk bisa saling menghargai
 - b. Melakukan serangkaian komunikasi dan presentasi perkembangan masyarakat kepada pihak-pihak pengelola hutan Negara (SSWK Cianjur, BKSDA Jawa Barat di Bandung). Dialog ini pada beberapa kesempatan melibatkan masyarakat secara langsung
 - c. Melakukan dialog dengan pemerintahan daerah melalui lembaga-lembaga lingkungan di tingkat kabupaten Cianjur.
 - d. Melakukan dialog dengan pihak-pihak perguruan Tinggi (IPB) untuk mendapat dukungan secara ilmiah dan politis, sehingga diharapkan menjadi penekanan kepada pihak pemerintah pusat.
 - e. Meningkatkan apresiasi berbagai pihak terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui penyebaran informasi di berbagai media massa seperti internet, media cetak siaran radio, juga dalam berbagai kegiatan pertemuan LSM (lihat lampiran).

2. Penilaian pada hasil kegiatan

a. Tujuan kegiatan yang tercapai

Ada dua sasaran dari proyek ini, pertama adalah “untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan Cagar Alam Gn. Simbang yang bekerja sama dengan para pihak untuk mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dalam cara yang berkelanjutan”. Tujuan ini telah dicapai melalui kesepakatan yang dibangun dalam perencanaan bersama oleh masyarakat yang akhirnya menempatkan mereka sebagai subjek pengelola lingkungan dan

hutan. Partisipasi masyarakat tersebut kemudian mendapat penguatan secara legal dari institusi publik setempat yaitu kelembagaan Desas. Tujuan kedua adalah ”untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi lokal yang ramah lingkungan yang didasarkan pada potensi lokal dan pasar regional”, baru sebagian dapat tercapai ketika masyarakat melakukan kegiatan pertanian ramah lingkungan sebagai basis usaha mereka. Hasil-hasil usaha mereka belum optimal mengangkat potensi lokal apalagi mencapai pasar regional. Selain masih ada keterbatasan kapasitas, ternyata pengembangan ekonomi di sekitar CA. Gn Simpang belum bisa dicapai dalam waktu singkat. Pengembangan ekonomi lokal nampaknya harus mendapat perhatian khusus, bukan bagian dari sebuah proyek.

Kegiatan	Tercapai	Tidak Tercapai
1. Sosialisasi program	Tercapai	
2. Peningkatan kesadaran	Tercapai	
3. Koordinasi inter-dan intra- desa	Tercapai	
4. Loka karya desa	Tercapai	
5. Pemetaan zonasi	Tercapai, sebagian	Tidak di semua desa
6. Inventarisasi biological dan masyarakat	Tercapai	
7. Pengelolaan tata guna lahan	Tercapai, sebagian	Tidak di semua desa
8. Membuat aturan pengelolaan	Tercapai	
9. Training institusional	Tercapai	
10.Mendirikan organization lokal	Tercapai	
11.Training dan penguatan usaha ekonomi lokal	Tercapai, baru pada mengangkat potensi lokal	Tidak, untuk pemasaran
12.Monitoring dan evaluasi	Tercapai	Tidak, untuk pendokumentasian

Setidaknya khusus pada:

- keuntungan jangka pendek bagi masyarakat yang meliputi tiga aspek yaitu:

Aspek ekologi:

- Adanya aturan masyarakat untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam oleh masyarakat lokal;
- Kerusakan hutan tidak terjadi lagi, penebangan kayu sudah sangat jarang dilakukan di dalam kawasan hutan;
- Satwa-satwa hutan sudah mulai aman dari perburuan, menjadi atraksi yang meningkatkan kebanggaan masyarakat akan daerah tempat tinggalnya;
- Sangat mengurangi adanya banjir dan tidak tercatat terjadi longsor, diantaranya selain hutan tidak terganggu, juga lahan-lahan kritis mulai dipelihara dengan ditanami pohon pelindung;
- Pasokan air terhadap masyarakat melalui sungai lebih lancar dan lebih berkesinambungan.

Aspek sosial:

- Mengurangi biaya sosial dalam penyelesaian sengketa air/kincir air pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya sering terjadi. Dengan demikian berkurangnya sengketa memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan penerangan untuk anak-anak belajar, bersosialisasi dengan tetangga.
- Mengurangi biaya dan waktu perbaikan saluran air/irigasi, menurut penduduk setempat kalau dahulu diperlukan dua hari untuk membersihkan saluran, saat ini hanya setengah hari karena tidak banyak lumpur dan sampah yang menghambat saluran air. Biaya-biaya dan waktu yang tidak terbuang bisa membantu meringankan keperluan keluarga dan berarti mengurangi beban para ibu rumah tangga.
- Masyarakat mempunyai peraturan/hukum yang disepakati bersama dalam menangani pelestarian sumber daya alam mereka,
- Mendapatkan proses pembelajaran dalam penyelesaian masalah secara mandiri yang mendapat legalitas dari institusi desa sebagai institusi masyarakat, sehingga kepercayaan diri masyarakat meningkat bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri,
- Kaum perempuan mendapat kesempatan untuk menuangkan kebutuhan dan suara mereka dalam setiap pemecahan masalah bersama secara langsung dan juga kesempatan untuk berorganisasi

Aspek ekonomi

- Areal sawah yang dapat digarap menjadi lebih luas karena pasokan air dari hutan lebih banyak dan lebih lama yang berarti kesempatan kerja dan mendapatkan penghasilan bagi masyarakat menjadi lebih besar. Beberapa sawah yang dulunya tidak dapat digarap karena kurang air sekarang sudah kembali bisa digarap sehingga hasil pertanian meningkat,
- Ketersediaan pasokan rumput untuk ternak jauh lebih memadai karena selain ketersediaan air mulai membaik juga rumput di pinggir sungai yang dulunya pada waktu musim hujan tertutup lumpur, saat ini sudah kembali bisa diambil untuk ternak mereka,
- Pembibitan dan penanaman kayu di lahan masyarakat telah dimanfaatkan langsung untuk kayu bakar, sementara bibit kayu lainnya menjadi penghasilan tambahan melalui jual beli bibit kayu. Ketersediaan kayu bakar juga memberikan kesempatan untuk menghidupkan kembali local enterprise yang dulu sempat terhenti karena pasokan kayu bakar dari hutan terhenti,
- Pertanian organik ternyata memberikan keuntungan pada petani karena biaya pengadaan pupuk yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pupuk anorganik dan ini berarti lebih banyak uang yang dihasilkan oleh petani karena rasio uang hasil produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya produksinya. Percobaan pertanian padi organik telah memberikan keuntungan pada penduduk yang memulainya karena biaya pembelian pupuk sangat rendah, hal ini juga menjadi inspirasi bagi petani lain untuk mengikutinya.

- Keuntungan jangka panjang bagi masyarakat;
 - Pasokan air sudah mulai membaik dan konstan, hal ini dapat mendorong meningkatkan pengolahan lahan untuk pertanian
 - Pasokan air juga berpotensi untuk mengembangkan mikrohydro sebagai bagian dari upaya mengembangkan alternative usaha-usaha local berbasis tenaga listrik
 - Masyarakat yakin bahwa dalam 7-10 tahun kemudian akan tersedia banyak pohon aren karena hutannya tidak terganggu sehingga satwa penyebar biji aren akan memainkan peranannya.
 - Kebijakan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi desa adalah tidak bertentangan dengan pelestarian lingkungan. Upaya pertanian organik dan pengembangan NTFP (hasil hutan non kayu) akan membantu mengurangi kost usaha pertanian dan meningkatkan keuntungan
 - Terpeliharanya hutan Masyarakat memperoleh dukungan dari desa dalam pelaksanaan pemeliharaan hutan, dengan kata lain prestasi mereka telah menjadi perhatian dan mendapat penghargaan dan beberapa dukungan dari pihak luar, baik dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi
 - Kegiatan pembibitan kayu dan penanaman kayu di lahan masyarakat sudah mejadi kebiasaan umum warga desa, sehingga saat ini beberapa kebun kayu tersebut bisa dipanen baik untuk kebutuhan kayu bakar.
- Keuntungan bagi konservasi di tingkat ekosistem:

Keuntungan bagi konservasi di tingkat ekosistem adalah komunitas local menegaskan kembali nilai-nilai yang mereka miliki dengan mengembangkan metoda baru untuk mengatur lahan dan hutan di sekitar mereka. Penegasan nilai-nilai ini dituangkan dalam peraturan desa yang mengatur peran warga desa dalam memelihara lahan dan hutan. Peraturan hasil kesepakatan bersama tersebut dikukuhkan secara legal melalui kelembagaan resmi masyarakat, yaitu kelembagaan desa, yang secara hukum diakui oleh negara.

Peraturan desa tersebut juga merupakan jaminan dari masyarakat bahwa mereka akan menjaga dan melestarikan lingkungan dan hutan mereka dengan sistem manajemen yang telah disepakati bersama tersebut dan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Pada gilirannya hutan akan terpelihara dari gangguan-gangguan seperti illegal logging, land encroachment and animal hunting. Selain itu, melalui manajemen tersebut masyarakat menjamin pemanfaatan NTFP secara berkesinambungan dan lestari serta tidak mengganggu kondisi hutan.

b. Kekuatan proyek

Kekuatan utama dari proyek ini adalah keterlibatan masyarakat didalamnya. Pada awalnya focus kegiatan berlangsung di dua desa, tetapi kemudian tiga desa disekitarnya turut berpartisipasi dalam program ini. Masyarakat telah mengeluarkan jaminan keberlangsungan hutan dengan modal swadaya sendiri. Kegiatanm pengamanan hutan secara swadaya kelompok dan juga dalam proses perencanaan bersama adalah sebagian dari bukti-bukti partisipasi aktif yang didorong oleh kesadaran pentingnya melakukan sesuatu untuk memperbaiki lingkungan mereka.

c. Kelemahan proyek

Kelemahan yang cukup menonjol dari proyek ini adalah kesiapan masyarakat dalam menindak lanjuti hasil perencanaan bersama dalam bidang pengembangan ekonomi. Kelemahan ini nampaknya berkaitan juga dengan meluasnya adopsi program pertama dan masalah-masalah yang harus diselesaikannya. Sehingga tersisa sedikit kesempatan untuk membuat kajian yang lebih rinci mengenai potensi desa dan juga perbaikan sistem pengelolaan hasil pertanian (*livestock management*).

Selain itu, kelemahan dokumentasi proses oleh lembaga pelaksana mengakibatkan banyak informasi dan pembelajaran yang terjadi selama kegiatan tidak mampu terekam dengan baik.

d. Pembelajaran

1. Sosialisasi program dengan multi variasi pendekatan melalui pengetahuan lokal, religi dan budaya yang dikemas dan disampaikan dalam “bahasa lokal” efektif untuk membangun pengetahuan dan pemahaman individu. Kehati-hatian dalam penyampaian program diperlukan untuk mengantisipasi kebiasaan lama (pemerintah, termasuk LSM) yang bersifat “sinterklas/karikatif”(?) yang menciptakan ketergantungan bukan keberdayaan. Masyarakat akan merespon bahasa sosialisasi, artinya kalau bahasanya keproyekan yang terbatas waktu dan sangat rigid berorientasi pada “keuntungan” si pembawa proyek, mereka akan merespon dengan resistensi bahasa proyek juga, mengambil keuntungan sesaat dan kemudian menunggu proyek-proyek yang akan datang kemudian.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dibuktikan dengan menurunnya perusakan hutan. Kesadaran individu yang dibangun dari ikatan keluarga kemudian diorganisir menjadi kesadaran komunitas mampu memunculkan aksi kolektif yang berdampak cukup luas. Kesadaran kolektif yang ditransformasi kepada masyarakat yang lebih luas dapat memunculkan adanya monitoring dan evaluasi secara mandiri. Proses membangun kesadaran komunitas yang memunculkan aksi kolektif membutuhkan kesabaran dan analisa psikologi massa yang cermat.
3. Kerjasama inter dan intra desa telah mendorong pelaksanaan program dari kelompok kecil sampai ke lima desa. Kebersamaan secara moral menjadi media yang efektif untuk menggalang kerjasama. Respon yang didapat ketika menguatkan kerjasama adalah menuntut kehati-hatian pendamping dalam hal distribusi perhatian dan dukungan. Pengalokasian dan dukungan finansial akan lebih diutamakan dalam bentuk barang dan jasa yang bisa dirasakan bersama dan diarahkan untuk meningkatkan apresiasi kerja-kerja kelompok.
4. Lokakarya-lokakarya desa yang dilaksanakan masyarakat mengantarkan mereka pada adanya dokumen pengelolaan hutan yang dibangun dari perencanaan desa. Hasil-hasil lokakarya tersebut menunjukkan bahwa masyarakat local lebih mampu menganalisa kebutuhannya dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan kapasitas mereka. Pada dasarnya inti pekerjaan bukan pada penyelenggaraan loka desa tetapi menggawangi hasil-hasil loka desa ke arah implementatif. Dalam hal ini loka desa dapat dikatakan sebagai tungku pembakar semangat masyarakat, tetapi kemudian bagaimana memelihara supaya

semangat masyarakat terpelihara dan tersalurkan pada kebutuhan-kebutuhan mereka yang sudah terlanjur dicanangkan. Dengan kata lain, lokakarya desa adalah tahap awal pekerjaan, bukan tahap akhir.

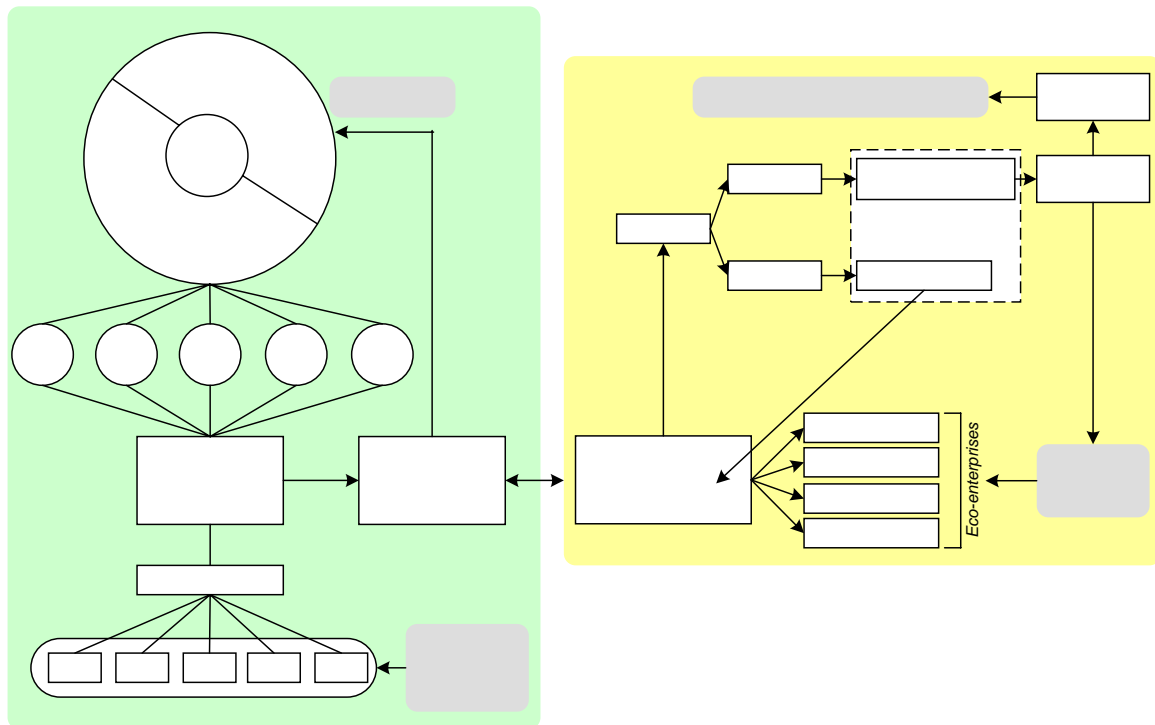
5. Pemetaan zonasi telah mendorong masyarakat memahami wilayah kelola beserta potensi dan ancamannya. Pemahaman terhadap wilayah kelola secara sadar oleh masyarakat mampu menghindarkan, bahkan menyelesaikan konflik horizontal mengenai pengelolaan lahan.
6. Inventarisasi biologi dan kemasyarakatan adalah salah satu bekal masyarakat sebagai acuan untuk mengembangkan program pemeliharaan hutan dan ekonomi desa. Partisipasi masyarakat dalam melakukan inventarisasi memadukan pengetahuan lokal dengan metode ilmiah menjadi ajang berbagi pengalaman. Hasil yang diperoleh dari inventarisasi menjadi lebih kaya. Masyarakat juga merasa memiliki sehingga permintaan presentasi hasil inventarisasi di tingkat desa menandakan antusiasme masyarakat yang dimunculkan oleh penghargaan yang mereka terima ketika menjadi bagian dalam proses inventarisasi.
7. Pengelolaan tataguna lahan oleh masyarakat menunjukkan adanya keinginan yang kuat dalam membagi dan mengelola lahan kelola sesuai dengan peruntukannya. Sistematisasi pengolahan lahan ini lebih menguatkan masyarakat akan kebersamaan. Kesepakatan ini memperluas aspek sosial berupa kesepakatan penetapan lahan komunal menjadi lebih kongkrit.
8. Pembuatan aturan pengelolaan aturan pengelolaan tersedia awalnya masyarakat mengeluh: “karaos, kahartos, rumaos” (terasa, paham dan merasa), tetapi tidak tauh bagaimana melakukannya. Kondisi tersebut hampir dijumpai di banyak lokasi pada masyarakat yang sudah kehilangan aturan komunalnya dan tidak berdaya serta tidak diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan komunal dengan pendekatan kekinian. Peran institusi publik menjadi pelengkap dan penguat kesepakatan komunal tersebut. Adanya aturan yang dibuat bersama telah mendorong untuk mewujudkan “bagaimana kami melakukannya”
9. Pelatihan institusi telah mendorong berjalannya proses menyelesaikan masalah secara mandiri, seperti untuk penyidikan kasus perusakan hutan dan mengelola pembibitan kayu. Pada dasarnya mereka telah memahami praktik-praktik penyelesaian masalah di tingkat lokal, dengan demikian kontribusi penting dari pelatihan institusi adalah menaikkan tingkat kepercayaan diri dan kebanggaan akan praktik-praktik yang telah dilakukan. Penguatan kapasitas institusi masyarakat di tingkat lokal menjadi poin penting dalam melakukan sebuah gerakan bersama yang terkoordinasi dan termonitoring
10. Monitoring dan evaluasi lebih efektif bila dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Modal kemandirian monitoring dan evaluasi ini adalah kesadaran kolektif yang mampu menempatkan partisipasi masyarakat pada level self mobilisation

3. Rencana kedepan

Cagar Alam Gn. Simpang dikelilingi oleh sembilan desa, lima desa telah melakukan program ini dan telah membuat tata kelola hutan di masing-masing desa. Tindak lanjut dari kegiatan adalah (juga lihat gambar 3):

- Penguatan kelembagaan Raksabumi di setiap desa;
- Replikasi terhadap empat desa lain yang berada di wilayah barat Cagar Alam Gn. simpang;
- Pembentukan dan penguatan tata kelola air, termasuk di dalamnya berkoordinasi dengan kelembagaan ekonomi desa sehingga membentuk dan menguatkan tata kelola daerah tangkapan air (*watershed*).
- Pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal.

Gambar 03. Skema konsep rencana kedepan untuk memperluas atau mereplikasi kegiatan



Diseminasi Informasi

Dokumentasi proses pergerakan masyarakat Gn simpang serta perkembangannya telah disebarkan ke berbagai pihak dengan berbagai cara. Keluaran dari program, terutama film dokumenter dan dokumen peraturan desa dijadikan bahan untuk menyebarkan informasi. Berikut ini adalah gambaran penyebaran informasi dan beberapa catatan mengenai respon balik dari para penerima informasi tersebut.

Penyebaran berita

1. Surat elektronik
 - Mailing list kebunpetani
 - Mailing list tatarsunda
 - INCL (Indonesian Nature Conservation Newsletter)
 - YPAL Website
2. Buletin lokal
 - Bulletin Bericik, Sukabumi
3. Siaran Radio
 - PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) Regional Jawa Barat
 - Seri *talk show* di RRI Bandung,

Pemutaran film dokumenter

1. LSM/NGO
 - Conservation International (CI) - Indonesia Program, Jakarta
 - Greencom Foundation, Jakarta
 - Lead, Jakarta
 - GEF-SGP, Jakarta
 - Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI), Bogor
 - Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC), Sukabumi
 - Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Bandung
 - Yayasan Sumber Ilmu (YSI), Bandung
2. Masyarakat
 - Masyarakat lima desa di Gunung Simpang, Cianjur
 - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cikananga, Sukabumi
 - Komunitas Kalam Tegal Gundil, Bogor
3. Universitas
 - Pusat Pengkajian dan Perencanaan Pengembangan Wilayah /P4W) – IPB, Bogor
4. Pemerintahan
 - Badan Pembangunan Daerah/BAPEDA Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
 - Badan Pengelola Hutan Sungai Wain, Balikpapan - Kalimantan Timur

Peraturan Desa yang dibuat Masyarakat Gn Simpang telah disebarkan kepada berbagai pihak. Para pihak tersebut sebagian besar, terutama NGO, aktif meminta contoh peraturan desa sebagai bahan acuan atau perbandingan dengan kegiatan mereka. Berikut ini pihak-pihak yang tercatat telah menerima Peraturan Desa, diantaranya adalah:

1. Pemerintahan
 - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Jawa Barat (pasif)
 - Bappeda Kabupaten Cianjur (pasif)
 - Kantor AMDAL Kabupaten Cianjur (pasif)
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Barat (pasif)
 - Kecamatan Cidaun, Cianjur (pasif)
2. Organisasi
 - PILI, Bogor (aktif)
 - PPSC, Sukabumi (aktif)
 - DPKLTS, Bandung (aktif)
 - CI-Indonesia, Jakarta (pasif)

- Kemala, Jakarta (pasif)
 - Lead, Jakarta (pasif)
 - GEF-SGP, Jakarta (pasif)
 - Yayasan Sinurat Layung, Cianjur, West Java (aktif)
 - Mitra Bentala, Lampung (aktif)
 - Sanari, Medan, Sumatra Utara (aktif)
 - CARE Palu Office, Sulawesi Tengah (aktif)
 - Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat (LPMA), Kalimantan Selatan (aktif)
 - Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia (YCHI), Kalimantan Selatan (pasif)
 - Yayasan Jambata, Palu, Sulawesi Tengah (aktif)
 - Yayasan Ekowisata Sumatra Utara (YESU), Sumatra Utara (aktif)
 - YSI, Bandung (aktif)
 - Yayasan BIKAL, Kalimantan Timur (aktif)
 - YPSHK, Sulawesi Utara (aktif)
3. Konsorsium
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (aktif)
 - Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (aktif)
 - Mitra Dieng (aktif)
4. Universitas
- IPB – P4WD (aktif)
 - USU (aktif)
5. Komunitas
- Masyarakat Pegunungan Dieng, Jawa Tengah (aktif)
 - Masyarakat Desa Pasawahan, Sukabumi (aktif)
 - KSM Cikananga, Sukabumi (aktif)
 - Masyarakat Desa Cimaragang, Cianjur (aktif)

Masyarakat Gn Simpang telah **mempresentasikan langsung** kegiatannya kepada masyarakat di luar komunitasnya, diantaranya di:

- PPSC, Sukabumi, Jawa Barat
- PILI, Bogor, Jawa Barat
- Forum Pertemuan Komunitas, Bogor
- GEF-SGP, Jakarta
- P4W-IPB, Bogor

Ragam Tanggapan

Setelah berita mengenai lahirnya Peraturan Desa di Gn Simpang, juga peraturan desa disebarkan baik melalui milis maupun pada beberapa pertemuan dan diskusi terbatas, diperoleh beberapa komentar, diantaranya adalah:

Tanggapan dari anggota grup milis kebunpetani:

Andri Santosa (RMI): Tertarik sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut untuk di wilayah Halimun, sebagai kegiatan analisis perdes di 2 kecamatan Halimun, Bogor

Rifian (LBH- Medan): Isu ini menarik

Kurniawan Adi Nugroho: Ini merupakan langkah kongkrit yang cukup maju sebagai alternatif bagi proteksi kekuasaan rakyat atas sumber daya rakyat oleh rakyat itu sendiri

Walda Tana-Toraja: Sepertinya ada perebutan hak otonomi antara desa dan kabupaten, sehingga perlu tukar menukar informasi anatara perdes melalui lalu lintas kabupaten dan propinsi

George (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN): Ini merupakan proses politik yang menjadi bahan pelajaran bagi komunitas lain. Ada beberapa perbaikan kalimat, seperti penggunaan kawaasan dan daerah, singkatan, penambahan kata

Andiko (LBH-PDG): Langkah maju yang telah dilakukan desa Cibuluh, tetapi ada yang harus diperhatikan kalau peraturan tersebut jika tidak mengakar dan tidak didukung masyarakat akan mudah dimentahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Perdes adalah bentuk lain dari perlawanan komunitas terhadap hegemoni negara, oleh karena itu harus didukung oleh basis masyarakat yang kuat.

Pellokilla/ Yones (Y.KemalaYones): Perdes tidak harus mengikuti standar negara seperti pemakain MENIMBANG, MENINGAT agar tidak kontradiktif satu sama lain

Kurniawan: Kita perlu mencoba untuk tidak memasukkan undang-undang yang selama ini dinilai cacat (baik moral/proses), masukan juga hasil musyawarah di tingkat komunitas sebagai konsideran. Bahasa jangan terlalu terpaku pada bahasa hukum.

LBH-PDG (Andiko): Ada 3 syarat dasar yaitu 1) filosofis: ketentuan harus mengacu pada hukum untuk kearifan yang hidup di tengah-tengah rakyat; 2) sosiologis: mengatur apa-apa yang dibutuhkan oleh rakyat; 3) Yuridis: menguntungkan rakyat. Yang terpenting adalah komunalitas rakyat dalam melaksanakan materi peraturan tersebut. Ketentuan yang sangat positif ini untuk mengcover komunitas lain di luar desa, dan untuk komunitas tersebut kita mesti belajar pada ketentuan adat yang tidak positif.

Komentar langsung:

Dari pihak pemerintahan, secara umum komentarnya positif tetapi sangat singkat, mencukupkannya dengan kata “bagus”

Wiratno (Policy Analyst CI-Indonesia Program) mengatakan bahwa dia meyakini proses-proses yang dilakukan dalam skala local akan memberi peluang yang besar untuk berhasil, termasuk untuk pelaksanaan perdes. Singkatnya dia bilang “small is beautiful”

Budi Sutrisno, Director of Yayasan Sumber Ilmu (YSI): Memberitakan kegiatan masyarakat Gn Simpang langsung kepada Menteri Kehutanan Nabil Makarim yang kemudian tertarik untuk mengunjungi masyarakat Gn Simpang sebagai daerah studi banding dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GNRHL).

Profesor Otto Sumarwoto (Pakar Lingkungan, Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran Bandung) memberikan komentar bahwa Perdes yang dibuat masyarakat merupakan bukti tentang sistem pengelolaan yang diujarkannya yaitu Atur Diri Sendiri (ADS)

Professor Effendi Anwar (IPB), mengatakan bahwa kegiatan masyarakat Simpang adalah sebuah proses yang bagus dan seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Di lain pihak, dukungan pemerintah lemah dan kadang kala ketika ada masyarakat yang maju sering merasa “kehilangan pemasukan”. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu pertama membangun masyarakat tingkat bawah dan kedua mendorong pihak pemerintah untuk mendukung proses penguatan masyarakat.

Effendy A Sumardja (Staf Kementrian Lingkungan Hidup), mengatakan bahwa program Simpang yang dilakukan YPAL sudah bagus, ditandai dengan munculnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program tersebut. Beliau menyarankan, setelah program menjadi milik masyarakat, upayakan untuk menjadi milik pemerintah tingkat kecamatan dan selanjutnya menjadi milik Kabupaten Cianjur.

Resit Sozer (Wakil Manager PPSC, Sukabumi): “keberadaan peraturan lokal dan masyarakat terlibat aktif didalamnya untuk mengamankan hutan, hal itu sangat baik jika diadopsi secara nasional untuk melestarikan hutan;

Fauzan Jamal (pengamat gerakan sosial – Mahasiswa S2 Antrophologi Universitas Indonesia): “Apa yang terjadi di masyarakat Pegunungan Simpang, meskipun tergolong kelompok kecil, tetapi itulah model dari gerakan sosial yang terarah, artinya ada tujuan yang jelas yang dapat diikuti oleh masyarakat. Ini adalah sebuah model yang berbeda dari gerakan sosial yang umumnya terjadi di Indonesia”.